

Pemberdayaan Sektor Informal di Kabupaten Ponorogo

Asis Riat Winanto

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: asiserwe@gmail.com

Khusnatul Zulva Wafirotin

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: khusnafeump@gmail.com

Abstract

The informal sector in Ponorogo is a controversial daily phenomenon. On the one hand, the district authorities often are not friendly to them. But, on the other hand they are used as a source of revenue for local governments through the collection of the levy and to solve the problems of employment in urban areas. However, the issue of the informal sector can not be left alone, because the day their numbers grew in number and will result in public space disruption. Based on research that has been conducted shows that the informal sector players want their empowerment so that its business can be more advanced and keep it running. Several alternative development activities expected by informal sector operators are: the procurement of wagons for businesses, entrepreneurship training, the establishment of an informal group of business operators and the ease of obtaining credit. While the research conducted related to the empowerment of the informal sector seen their empowerment by forming a group / community. The formation of a group/community is based on the desire to maintain their existence in the informal sectors. Besides, the existence of this community are expected as a forum to resolve the problems related to the informal sector. Another reason, the establishment of the community is expected to be the bridge between informal sector players and government.

Keywords: *empowerment, informal sector, Ponorogo District*

A. PENDAHULUAN

Tidak dipungkiri bahwa keberadaan sektor informal sering menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota, misalnya menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan dan keindahan, kesemrawutan lalu-lintas, potensi konflik yang relatif besar dan sebagainya. Namun demikian, kegiatan pada sektor informal ini mempunyai kontribusi yang berarti bagi perekonomian masyarakat, terutama pada saat semakin sempitnya lapangan kerja. Kegiatan pada sektor informal perlu ditangani/ditata secara terpadu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, diperlakukan secara manusiawi, dan berorientasi pada pemberdayaan pelaku sektor informal tersebut.

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kotemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja.

Meskipun tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara, sektor informal dapat memberikan subsidi sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar. Bahkan, tatkala perekonomian nasional mengalami kemunduran akibat resesi, sektor informal mampu bertahan tanpa membebani ekonomi nasional, sehingga roda perekonomian masyarakat tetap bertahan. Peran sektor informal ini telah berlangsung sejak lama dalam pasang surut perkembangan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi.

Sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjaannya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah. Mereka tidak pernah menuntut macam-macam

dari pemerintah, kecuali untuk masalah legalitas, jaminan keamanan, pengayoman, serta birokrasi yang sederhana dengan biaya yang murah. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, terlihat bahwa masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak tepat serta salah sasaran khususnya yang berkaitan dengan usaha pemberdayaan masyarakat yang berkecimpung dalam usaha sektor informal. Ditambah lagi dengan kebijakan dari dunia perbankan yang pada dasarnya adalah agen pembangunan mempunyai tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat strata bawah untuk keluar dari belenggu kemiskinan lebih banyak memihak kepada kaum "atas". Kredit perbankan yang selama ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk yaitu para pengusaha kelas atas dan konglomerat dan kelompok-kelompok strategis seyogyanya mulai dialihkan untuk dikucurkan juga kepada masyarakat strata bawah yang miskin dan informal yang merupakan bagian terbesar dari penduduk warga Negara Indonesia. Melihat kondisi seperti ini menunjukkan bahwa usaha sektor informal sangat dipinggirkan dalam pengembangan usaha ekonomi mereka dan hanya dianggap sebelah mata saja serta tidak adanya perhatian serius dari pemerintah untuk membantu mereka.

Padaحال, saat krisis melanda negara ini tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam (buffer) gejala di pasar kerja perkotaan dengan menampung-limpahan jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak meledak sedahsyat yang ditakutkan. Pasca krisis, sektor informal kembali menjadi katup pengaman di tengah ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal menyediakan lapangan kerja.

Mengingat peran sektor informal yang cukup positif dalam proses pembangunan, sudah sewajarnya nasib para pekerjanya dipikirkan. Beberapa kebijakan, baik langsung maupun tidak, untuk membantu pengembangan masyarakat melalui pembinaan kegiatan usaha pekerja di sektor informal memang sudah dilakukan. Namun ada kecenderungan kegiatan ekonomi di sektor informal dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan. Tanpa bermaksud mengurangi arti pentingnya kebijakan yang telah ada, kebijakan yang biasa diberikan kepada pengusaha besar mungkin dapat dikurangi, kemudian prioritas diberikan pada kegiatan sektor informal dan memihak pada kepentingan masyarakat.

Sektor informal di Kabupaten Ponorogo merupakan fenomena keseharian yang bersifat kontroversial. Di satu sisi, pemegang otoritas kabupaten sering bersifat tidak ramah pada mereka ("mengusir") mereka dari tata ruang kota, tetapi di sisi lain mereka dijadikan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten melalui pungutan retribusi dan dapat mengatasi permasalahan ketenaga-kerjaan di perkotaan. Namun demikian, persoalan sektor informal tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena semakin hari jumlah mereka semakin bertambah banyak dan akan berakibat pada terangnya ruang gerak publik.

Data dari pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha sektor informal di seputaran jalan baru berjumlah 107 pelaku usaha sektor informal (Dians Indakop dan UKM Kabupaten Ponorogo, 2014). Dari angka tersebut terlihat bahwa jumlah pelaku usaha sektor informal cukup banyak, Sudah tentu, kebijakan kota untuk mengatasi berkaitan dengan pemberdayaan sektor informal harus berangkat dari karakteristik (profil) mereka, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. Untuk itu, diperlukan data dan informasi tentang karakteristik sektor informal, seperti historis usaha mereka, motivasi memasuki sektor ini, dari mana mereka berasal, latar belakang pendidikan dan pengalaman, dan lain sebagainya.

Disamping itu, berdasar penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pelaku sektor informal menginginkan adanya pemberdayaan agar usahanya bisa lebih maju dan tetap berjalan. Beberapa alternative kegiatan pemberdayaan yang diharapkan oleh pelaku sektor informal adalah: adanya pengadaan gerobak untuk usaha, pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok pelaku usaha informal dan kemudahan dalam memperoleh kredit.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai upaya pemberdayaan sektor informal di Kabupaten Ponorogo. Berangkat dari pemaparan tersebut diatas maka masalah penelitian akan berkisar pada upaya pemberdayaan sektor informal di Kabupaten Ponorogo.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sektor Informal

Sektor informal merupakan sektor ekonomi yang terdiri dari unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang-barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya yang dibatasi oleh faktor kapital, baik fisik maupun ketrampilan.

Hidayat (1983) mendefinisikan sektor informal sebagai bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau sudah menerima bantuan tetapi belum bisa berdikari.

Dilihat dari lokasi, sektor informal dapat berada di daerah kota maupun desa. Sektor informal yang berada di pedesaan disebut sektor tadisional yang umumnya bergerak di sektor pertanian. Sedangkan yang berada di perkotaan tetap disebut dengan sektor informal dan sebagian besar tumbuh di sekitar daerah pertumbuhan sektor formal, seperti pedagang kaki lima yang tumbuh diantara pusat perkantoran.

Sektor informal dikenal dengan beberapa istilah, tergantung pada konteks dan sudut pandangnya. Istilah-istilah tersebut antara lain, ekonomi informal, ekonomi tidak terstruktur/teratur, sektor yang tidak terorganisir atau pekerjaan yang tidak tampak dan diperhatikan. Dalam konteks perkotaan, sektor informal seringkali merujuk pada keberadaan perusahaan kecil menengah yang memproduksi serta menjual barang dan makanan, atau menawarkan jasa yang melibatkan transaksi pasar dan pembayaran tunai. Aktivitas sektor informal perkotaan berbasis publik biasanya berbentuk perdagangan di jalanan, seperti pedagang kaki lima.

Beberapa karakteristik sektor informal, yaitu : mudah dimasuki, ketergantungan pada sumber daya asli, modal yang diperoleh secara lokal dan sedikit, kepemilikan bersifat kekeluargaan, operasi skala kecil, kurang perencanaan, padat karya dan teknologi yang diadaptasikan, produktivitas relatif rendah, biaya produksi pasokan, produksi, harga dan kesesuaian anggaran pendanaan. Kemudian keterampilan diperoleh dari sistem pendidikan nonformal, tetapi biasanya melalui magang atau pelatihan singkat, pasar yang bebas regulasi dan kompetitif atau mudah berubah.

2. Sektor Informal Perkotaan

Sektor informal atau ekonomi informal adalah kebalihan dari usaha formal yang berusaha untuk memperoleh penghasilan (income) di luar aturan dan regulasi institusi kemasyarakatan dalam tatanan sosial yang ada yaitu pemerintah sehingga dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Han Dieter Evers dalam Hidayat (1983) seorang pakar yang telah banyak melakukan penelitian di Indonesia, mendefinisikan sektor informal sebagai kegiatan ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah (*underground economy*) adalah kegiatan apa saja mulai dari kegiatan di dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, wanita bekerja yang tidak dibayar, sampai dengan penggelapan pajak serta berbagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktek ekonomi yang legal. Sektor informal perkotaan adalah mereka para pekerja di sektor informal yang berada di wilayah perkotaan. Mereka sebagian besar adalah para pendatang yang tergiur oleh gemerlap kehidupan di kota, terpengaruh oleh rekan sedesanya yang lebih dahulu sukses, di samping karena semakin langkanya lapangan kerja dan kehidupan di pedesaan sudah sangat sulit dan terbatas. Semakin sempitnya lahan pertanian di pedesaan, suksesnya program pendidikan dasar, pesatnya pembangunan di kota-kota dengan munculnya banyak industri telah mendorong terjadinya urbanisasi secara besar-besaran.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Konsepsi pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan dari model-model pembangunan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Disamping itu konsep ini juga muncul karena adanya harapan tumbuhnya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Diharapkan adanya pemberdayaan ini akan menumbuhkan kemandirian dan kemampuan masyarakat.

Pemberdayaan dapat ditujukan pada individu atau kolektif, namun demikian dalam konteks sebuah kebijakan pembangunan pem-

berdayaan- selalu akan ditujukan kepada kelompok secara kolektif atau biasa disebut dengan komunitas. Kebijakan pembangunan skala mikro ditujukan kepada komunitas-komunitas yang secara unik mempunyai karakteristik dan perilaku serta potensi yang berbeda. Sementara kebijakan pembangunan skala makro mempunyai jangkauan atau ditujukan kepada masyarakat secara lebih luas atau skala nasional.

Dan pada akhirnya pemberdayaan masyarakat, khususnya pem- berdayaan- kegiatan/usaha sector informal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Sasaran dari program pemberdayaan usaha sector informal/usaha mikro adalah meningkatnya kapasitas usaha, meningkatnya ketrampilan pengelolaan usaha, dan terselenggaranya kepastian, perlindungan, serta pembinaan usaha.

Pemberdayaan (*empowerment*) secara harifiah mengandung arti memberikan atau mendapatkan kekuatan (*power*), dengan demikian pemberdayaan selalu terkait dengan memberikan kemampuan kepada golongan miskin yang biasanya tidak berdaya, untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem organisasi

Para pakar memberikan definisi pemberdayaan secara beragam namun pada intinya makna pemberdayaan meliputi pemberian kekuatan dan memberikan hak-hak, berhubungan dengan mereka yang tidak berdaya, pengalihan kontrol sumber daya, sehingga dapat secara mandiri menentukan arah masa depannya sendiri, oleh karena itu partisipasi aktif diperlukan dalam setiap proses pemberdayaan. Pemberdayaan dapat ditujukan pada individu atau kolektif, namun demikian dalam konteks sebuah kebijakan pembangunan pemberdayaan selalu akan ditujukan kepada kelompok secara kolektif atau biasa disebut dengan komunitas. Kebijakan pembangunan skala mikro ditujukan kepada komunitas-komunitas yang secara unik mempunyai karakteristik dan perilaku serta potensi yang berbeda. Sementara kebijakan pembangunan skala makro mempunyai jangkauan atau ditujukan kepada masyarakat secara

lebih luas atau skala nasional. Pemberdayaan sebagai model kebijakan pembangunan alternatif, mencakup tiga sisi yaitu pemberdayaan sosial, politik dan psikologis.

Berkaitan dengan model pemberdayaan yang diambil, akan menekankan pada model pemberdayaan social dengan membentuk adanya suatu kelompok atau komunitas. Komunitas adalah satuan kelompok orang yang memiliki hubungan dan interaksi yang relatif intensif dikarenakan adanya kesamaan ciri dan atau kepentingan bersama. Jadi pada hakekatnya komunitas dapat diartikan sebagai kelompok penduduk dalam lokasi atau daerah tertentu yang dapat teridentifikasi dari masyarakat luas atau bagian dari masyarakat melalui intensitas kesamaan perhatian (*a community of interest*) dan atau peningkatan intensitas interaksi (Djayadi, 2001).

Paulus Wirutomo (2013) membedakan komunitas menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Komunitas Primordial adalah sebuah komunitas yang diikat oleh kesamaan ciri primordial seperti kesamaan suku, ras, agama dan daerah asal;
2. Komunitas Okupasional yaitu komunitas yang terbentuk dan diikat oleh kesamaan pekerjaan / profesi, seperti komunitas pedagang pasar, pegawai pabrik dan lain-lain; dan
3. Komunitas Spatial adalah komunitas yang diikat oleh kesamaan tempat tinggal seperti komunitas dalam satu RT/RW, kompleks, dusun atau kampung tertentu, komunitas penghuni rumah susun dan lain-lain.

Suatu komunitas yang pada dasarnya adalah sekelompok orang atau rumah tangga akan mempunyai potensi lebih karena merupakan kumpulan dari potensi setiap anggotanya. Sosial Capital, komitmen, partisipasi akan menjadi potensi komunitas selain komunitas lebih mengenal dan mengetahui permasalahan yang dihadapi. Atas dasar inilah muncul kebijakan pembangunan yang berbasis komunitas. Kebijakan pembangunan ini sebagai alternatif dan pelengkap kebijakan pembangunan yang ditujukan pada perbaikan kondisi kemiskinan (*poverty reduction*) dan masalah- masalah lingkungan yang lekat dengan kehidupan masyarakat strata bawah.

C. METODE PENELITIAN

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang model pemberdayaan sektor informal di kabupaten Ponorogo, yang sesuai dengan karakteristik sektor informal tersebut

Adapun fungsi dari penentuan fokus dalam penelitian ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (masuk dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh dilapangan. Dengan adanya fokus seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data yang dikumpulkan (Moleong, 2001).

Dengan memperhatikan keterangan diatas serta mengacu pada permasalahan, serta hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun sebelumnya, maka fokus dalam penelitian ini adalah untuk menentukan model pemberdayaan sektor informal sesuai dengan keinginan pelaku usaha sektor informal. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha sektor informal di Kabupaten Ponorogo.

2. Penetapan Lokasi Penelitian

Menurut Moleong untuk menentukan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan- kesesuaian lokasi dengan kerangka teori, memper- timbangkan- teknis operasional, yaitu dapat tidaknya lokasi dimasuki dan diteliti lebih dalam, serta kemungkinan untuk mendekati struktur sosialnya. Kemudian keterbatasan geografis, waktu, biaya, tenaga juga harus dipertimbangkan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Ponorogo, dan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha sektor informal di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pemilihan daerah penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan secara sengaja dengan maksud untuk menemukan sebuah daerah yang relevan dengan tujuan penelitian, dengan pertimbangan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tempat ini lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh tempat lainnya.

3. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Kasus (Case Study) yakni, pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau beberapa titik waktu. Penelitian ini melibatkan data kualitatif untuk menjelaskan keadaan yang terjadi

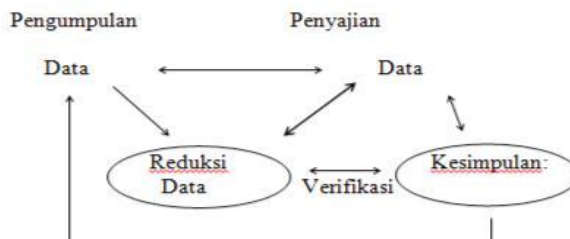
Sebagai salah satu metode penelitian, studi kasus digunakan dalam banyak situasi untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, bagi individu, kelompok, organisasi, sosial dan politik, serta fenomena yang berhubungan satu dengan lainnya. Studi kasus banyak diterapkan pada penelitian-penelitian psikologi, ilmu politik, pekerja sosial, bisnis dan perencanaan sosial. Namun, pendekatan studi kasus tidak familiar pada penelitian-penelitian ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi lainnya, keunggulan pendekatan studi kasus adalah peneliti mampu memenuhi semangat keingintahuan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi

4. Data dan Sumber Data

Dokumen sebagai sumber data didasarkan pada data primer yang diperoleh dari pelaku usaha sektor informal melalui wawancara mendalam (*indepth interview*).

5. Analisis Data

Tehnik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini mengacu pada analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992 dalam Yansen, 2002). Penyederhanaan dalam metode analisis data disederhanakan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Metode Analisis Data

Disamping itu pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2001) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.

Penelitian ini lebih merupakan penelitian yang bersifat diskriptif analitis, dalam arti penelitian ini tidak berhenti hanya pada yahap mendistribusikan data, fakta dan temuan lapangan, tetapi dalam pelaksanaannya dikembangkan dengan memberikan penafsiran yang memadai atas dasar hasil analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam arti tidak bermaksud menguji hipotesis,- tetapi bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial dengan memberi bobot yang tinggi dengan mengembangkan analisis dari penafsiran yang rasional sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. PEMBAHASAN

1. Keadaan Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Letak Kabupaten Ponorogo lebih kurang 200 km kearah selatan dari ibukota Propinsi Surabaya. Kabupaten Ponorogo berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara, Kabupaten Pacitan di sebelah selatan, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah di sebelah barat, dan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur.

Kondisi geografis Kabupaten Ponorogo sebagian besar berada pada dataran rendah, dengan suhu 27 derajat celcius s/d 31 derajat celcius. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sekitar 1.371,78 km², yang terdiri dari 21 kecamatan dan 305 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebanyak 899.328 jiwa terdiri dari 443.305 laki-laki dan 456.023 perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, 899.246 orang adalah WNI dan 82 orang WNA. Mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo beragama Islam (99,42%).

Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani dan buruh tani (42%).

Prasarana umum yang tersedia di kabupaten Ponorogo, masjid, musholla/langgar sebanyak 4.509, gereja 20 buah, vihara/klenteng 2 buah. Prasarana pendidikan, TK 390 sekolah, SD/MI 699 sekolah, SMP/MTs 158 sekolah, SMU/SMK/MA, 107 sekolah, Perguruan Tinggi, sebanyak 6, Pondok Pesantren sebanyak 12. Sarana kesehatan yang tersedia, Rumah Sakit Umum/Swasta sebanyak 6, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebanyak 87, Balai Pengobatan sebanyak 4, BKIA sebanyak 9 dan Klinik KB sebanyak 1. Sarana perhubungan yang tersedia di Kabupaten Ponorogo adalah jalan yang beraspal 1010,69 km, makadam 149,10 km, dan tanah 77,10 km. Jalan yang beraspal ini merupakan jalan yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan, dan antar kabupaten.

Demikian keadaan umum daerah penelitian, yang pada dasarnya merupakan daerah agraris, karena sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani.

2. Hasil Penelitian

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana model pemberdayaan yang dilakukan oleh kegiatan usaha sektor informal di Ponorogo, perlu dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat ada 8 variabel penting yang dapat menggambarkan karakteristik pelaku usaha sektor informal yang beraktifitas/berusaha di seputaran jalan baru. Kedelapan variabel yang diteliti yaitu karakteristik umur responden, jenis usaha (aktivitas) sektor informal, status perkawinan, tingkat pendidikan, asal daerah, keuntungan rata-rata per hari, modal awal untuk usaha dan lama usaha yang dilakukan. (Winanto, 2015)

Sementara dalam penelitian yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan sektor informal terlihat adanya pemberdayaan yang dilakukan dengan jalan membentuk suatu kelompok/paguyuban. Pembentukan kelompok/paguyuban ini didasari oleh keinginan untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam sektor informal. Disamping itu keberadaan paguyuban ini diharapkan sebagai wadah untuk

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sektor informal. Alasan lain dibentuknya paguyuban ini diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara pelaku sektor informal dengan pemerintah.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan beberapa paguyuban yang telah terbentuk, yaitu paguyuban "Mekar Sore". Paguyuban ini terbentuk tahun 2005 dan beranggotakan 60 pelaku. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup usaha mereka. Paguyuban yang diketuai oleh Bapak Sudar ini melakukan arisan tiap bulan secara anjangsana maupun di tempat usaha. Pada saat arisan anjangsana, kelompok ini juga membicarakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota sekaligus membicarakan tentang solusi bagaimana memecahkan masalah yang dihadapinya.

Ada juga paguyuban "Sido Muncul" yang mewadahi para pelaku usaha di bidang kuliner tradisional. Paguyuban ini berdiri sejak tahun 1998 dengan jumlah anggota yang mengalami perubahan, dengan jumlah terakhir sebanyak 26 pelaku usaha. Ada beberapa kegiatan kelompok yang diketuai oleh Bapak Marmun ini, diantaranya adalah membuat kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya. Selain itu mereka juga mengadakan arisan bulanan untuk ajang bertemu dengan saling berdiskusi tetnag usaha mereka, Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Ada juga paguyuban "Pramudaya" yang beranggotakan pelaku usaha bidang kuliner yang berupa warung nasi. Paguyuban yang berada dalam satu area ini dibentuk pada tahun 2006 dengan anggota 40 pelaku usaha.

Paguyuban lain yang juga menunjukkan pemberdayaan bagi anggotanya adalah paguyuban "Warga Jaya". Paguyuban ini beranggota-- kan 40 pelaku usaha yang kegiatan usahanya didominasi oleh ankringan ataupun warung kopi. Sama seperti paguyuban yang lain, beberapa kegiatan juga dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup usaha mereka.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup mereka diantaranya adalah: arisan kelompok, pembentukan simpan pinjam bagi anggota, halal bihalal, bakti sosial, kerja bakti, tamasya, dll.

Seperti yang dilakukan oleh paguyuban langgeng Mulyo dengan ketua Bapak Sudarmaji. Paguyuban ini melakukan bakti social berupa pemberian santuna, memberikan bantuan dana dalam pendirian masjid.

Atau kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban Ngudi Boga. Mereka melakukan kegiatan kerja bakti pada setiap hari Jum'at setiap minggu pertama tiap bulan di tempay usahanya. Hal ini dilakukan agar tempat usaha meraksi kebersihan tempat usaha tersebut.

Dan masih ada kegiatan lain yang mencerminkan bahwa paguyuban itu akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha mereka.

Dengan mengadakan kegiatan seperti tersebut diatas, kebersamaan antar anggota paguyuban bisa terjaga. Juga bisa digunakan sebagai ajang tukar informasi, ataupun media untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh anggota.

3. Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Diharapkan adanya pemberdayaan ini akan menumbuhkan kemandirian dan kemampuan masyarakat.

Pemberdayaan dapat ditujukan pada individu atau kolektif, namun demikian dalam konteks sebuah kebijakan pembangunan pemberdayaan selalu akan ditujukan kepada kelompok secara kolektif atau biasa disebut dengan komunitas. Kebijakan pembangunan skala mikro ditujukan kepada komunitas-komunitas yang secara unik mempunyai karakteristik dan perilaku serta potensi yang berbeda. Sementara kebijakan pembangunan skala makro mempunyai jangkauan atau ditujukan kepada masyarakat secara lebih luas atau skala nasional.

Dan pada akhirnya pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan kegiatan/usaha sector informal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sector informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Dalam prosesnya, pemberdayaan yang dilakukan oleh pelaku sektor informal di Kabupaten Ponorogo mencerminkan dua proses pemberdayaan, yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses lihan sebagian kekuatan atau kemampuan agar individu/kelompok lebih berdaya; dan penekanan pada proses mendorong atau memotivasi individu/kelompok untuk lebih berdaya dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Mayoritas alasan para pelaku sektor informal membuat paguyuban adalah agar mereka lebih mampu dalam menjaga kelangsungan usaha mereka. Ini mencerminkan bahwa mereka berusaha untuk lebih berdaya dan juga termotifasi untuk lebih berdaya.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sunarti bahwa pembentukan kelompok yang mewadahi pelaku sektor informal adalah agar kegiatan itu bisa berjalan terus, tetap bisa berlangsung.

Dalam konteks ini pemberdayaan yang dilakukan dengan membentuk paguyuban adalah kesadaran mereka untuk meningkatkan produktifitasnya dengan jalan mengelola kegiatan mereka secara mandiri. Harapan mereka dengan berdirinya kelompok kesejahteraan kelompok bisa ditingkatkan karena lebih tinggi keinginan untuk lebih maju (produktifitas lebih tinggi).

Bisa juga dilihat dari dimensi lain, bahwa kegiatan mereka membentuk paguyuban adalah adanya keinginan mereka dengan menggunakan pengetahuan mereka dengan mengaktualisasikan kepentingan mereka dengan bekerja sama antar anggota guna mewujudkan tujuan mereka membentuk paguyuban tersebut.

Ada diantara mereka yang membutuhkan dana tambahan untuk kegiatan usahanya, maka dengan terbentuknya kelompok tersebut, mereka bisa mendapatkan tambahan modal dengan memanfaatkan simpan pinjam yang mereka buat. Seperti yang disampaikan bapak Tobaya, bahwa setelah kelompok terbentuk, mereka membuat kegiatan simpan pinjam untuk menambah modal bagi anggotanya. Dan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.

Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa pemberdayaan ini akan menimbulkan keinginan seseorang atau kelompok untuk lebih berkembang dan merubah keadaan dirinya.

Kondisi yang terjadi dalam paguyuban di Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa pelaku sektor informal menunjukkan suatu inisiatif

dan kreatifitas pelaku sektor informal baik secara personal maupun kelompok untuk melakukan upaya perubahan kehidupan mereka melalui pembentukan paguyuban.

Ini terlihat dari adanya proses pembentikan kelompok tersebut. Pada awalnya mereka berkumpul karena merasa senasib. Dari kondisi inilah mereka melakukan pemberdayaan secara individu, dengan segala kondisi dan keterbatasan mereka, dengan pengetahuan mereka, dengan kreatifitas mereka, maka mereka bersepakat untk berkumpul denagn membetuk kerlompok atau paguyuban untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seiring dengan perkembangan jaman, maka mereka (kelompok) semakin elalui kelompok atau paguyuban yang telah dibentuk,

Sedang jika ditinjau dari aspek tahapan pemberdayaan masyarakat, pembentukan paguyuban ini menunjukkan proses partisipasi dari masyarakat dalam rangka menisamangkatkan derajat ekonomi mereka, melalui keberlansungan usaha mereka yang tetap terjaga.

Dengan partisipasi dari masing-masing anggota (pelaku usaha sektor informal), maka kelompok yang dibentuk tersebut semakin dapat digunakan sebagai media untuk berkomunikasi antar anggota kelomp- pok maupun dengan kelompok lain bahkan dengan pemerintah guna memmpertahankan keberadaan mereka dalam berusaha sekaligus meningkatkan produktifitas mereka dengan harapan pendapatan mereka lebih terangkat dan kesejahteraan lebih baik lagi.

Tindak lanjut dari proses pemberdayaan sektor informal pada dasarnya- merupakan suatu proses untuk menjaga kelangsungan, kelanggengan- usaha dalam arti bahwa bagaimana mereka tetap bisa berusaha sehingga sumber penghasilan dan penghidupan mereka tidak hilang dan tetap terjaga.

Fenomena peran kelompok kat juga terlihat dalam proses pemberdayaan sektor informal ini. Mereka berkumpul dalam satu kelompok atau wadah yang bisa menyalurkan keinginan mereka. Ada yang berkelompok berdasarkan kesamaan jenis usaha, berdasarkan wilayah/ daerah usaha, dan sebagainya.

Keberadaan kelompok yang mempunyai usaha sejenis, didasari pada keinginan untuk mengadakan bahan baku yang lebih cepat dan murah. Dengan pembentukan kelompok tersebut, keinginan mereka bisa diwujudkan, yaitu memperoleh bahan baku untuk berusaha secara

lebih cepat dan murah.

Disamping itu pembentukan kelompok juga didasari pada kesamaan daerah usahanya. Karena merasa senasib dan berada pada tempat yang sama, mereka berkumpul, berdiskusi, bertukar pendapat, hingga mereka membuat suatu kelompok atau paguyuban. Meskipun mereka berbeda usaha namun dengan persamaan nasib dan diwadahi dalam satu perkumpulan (kelompok), mereka bisa saling membantu, saling melengkapi dalam penyediaan bahan baku, dll

Secara teoritis keberadaan kelompok dalam suatu kelompok masyarakat uang menjadi obyekrsifat substitusi. Artinya munculnya kelompok didorong oleh pihak yang berada di luar obyek. Namun dalam kasus yang terjadi pada kelompok ini, munculnya ide pembentukan kelompok didasari dari inisiatif mereka sendiri. Pada awalnya mereka hanya berkumpul biasa, embicarakan hal-hal yang kurang berguna. Lambat laun mereka menyadari kalau mereka bisa bekerja sama dalam satu kelompok untuk memudahkan usaha mereka. Maka dibentuklah kelompok itu sebagai alat untuk pemberdayaan usaha mereka,

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah:

1. Ada proses pemberdayaan sektor informal di Kabupaten Ponorogo
2. Pembentukan kelompok/paguyuban itu didasari pada kesamaan usaha dan kesalaan lokasi usaha

DAFTAR PUSTAKA

- Djayadi, Rizal H. (2001). *Metode Riset dalam Community Development*.
Hidayat. (1983). *Definisi, Kriteria dan Evaluasi Konsep Sektor Informal: Sumbangan Pemikiran untuk Repelita IV. Analisa* tahun XII No. 7
Hill, Hall. (1996). *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966, Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Mudrajat Kuncoro. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (1st ed.). Yogyakarta; UPP AMP YKPN.
Miles, Matthew B dan Hubberman A. Michael. (1992). *Analisa data Kualitatif Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: UI Press.

- Moleong, Lexy, J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Keempat Belas. Bandung; PT. Remaja Rosda Karya.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Winanto, Asis Riat. (2005). *Alternatif Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ponorogo*. Penelitian individu. Tidak dipublikasikan.
- Winanto, Asis Riat. (2012). *Peran Lembaga Keuangan Informal terhadap Pemeberdayaan Kelompok Usaha sektor Informal*.
- Wiroutomo, Paulus. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. 18 (1)